

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional pada periode 2023–2025 serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional atau lebih dari 123 juta orang (Kementerian Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia, 2023). Salah satu subsektor UMKM yang dominan adalah kuliner karena relatif mudah dijalankan, fleksibel, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Usaha ini juga menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara mandiri (Bahri, 2022).

Namun pada pertumbuhan UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki literasi keuangan yang rendah, belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis sesuai standar akuntansi, serta belum memisahkan keuangan usaha dan pribadi (Dhani et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan kinerja keuangan sulit diukur secara akurat. Padahal, analisis laporan keuangan diperlukan untuk menilai kinerja usaha secara objektif serta mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Budi, 2026). Kinerja keuangan dapat dilihat melalui pendapatan, laba, pertumbuhan

usaha, dan pengelolaan arus kas sebagai indikator kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.

Permasalahan pengelolaan keuangan juga relevan di Kecamatan Trawas. Data awal tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja keuangan hingga Triwulan I masih belum optimal sehingga diperlukan percepatan pengelolaan anggaran (P. K. Mojokerto, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM. Selain itu, inklusi keuangan di wilayah perdesaan dan kawasan wisata cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan sehingga akses UMKM terhadap pembiayaan masih terbatas (OJK, 2022). Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berskala mikro dengan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis (B. P. S. K. Mojokerto, 2023).

Secara empiris, kondisi tersebut tercermin dari ketidakstabilan pendapatan, pencatatan laba yang belum akurat, dan pengelolaan arus kas yang belum optimal. Falila & Khoirina (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sederhana dapat meningkatkan kualitas pencatatan transaksi, efisiensi arus kas, dan kinerja keuangan UMKM. Selvinia et al. (2025) juga menjelaskan bahwa keterbatasan penyusunan laporan keuangan menyebabkan informasi keuangan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan, pembiayaan, dan

layanan keuangan digital, masih menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM (OJK, 2022). Maka literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM (Lusardi & Mitchell, 2014).

Kondisi tersebut semakin penting dikaji karena Kecamatan Trawas merupakan kawasan wisata yang memiliki potensi besar bagi pengembangan UMKM kuliner. Pertumbuhan pariwisata mendorong berkembangnya usaha makanan dan minuman, tetapi sebagian besar masih dikelola secara sederhana tanpa perencanaan bisnis dan pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha. Dengan demikian, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor yang relevan untuk dikaji dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Untuk memberikan gambaran mengenai persebaran UMKM di Kabupaten Mojokerto, berikut disajikan data jumlah UMKM berdasarkan kecamatan.



Gambar 1.1 Data Usaha Mikro UMKM Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah UMKM di Kecamatan Trawas relatif

lebih sedikit dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Mojokerto. Meskipun demikian, Trawas memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya sektor kuliner, karena merupakan kawasan wisata yang terus berkembang. Potensi tersebut didukung oleh prestasi Desa Ketapanrame sebagai Juara I Desa Wisata Nusantara 2023 kategori desa maju/mandiri sekaligus salah satu desa wisata terbaik tingkat nasional (Budianto, 2023). Capaian tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan UMKM berbasis pariwisata di Kecamatan Trawas.

Namun potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala berupa pencatatan keuangan yang belum sistematis, pengelolaan arus kas yang kurang optimal, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman akuntansi dan minimnya kebiasaan melakukan pencatatan keuangan secara terstruktur (Noviawan et al., 2025). Akibatnya pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja, menyusun perencanaan, mengendalikan biaya, dan mengambil keputusan bisnis sehingga dapat berdampak pada profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Penelitian Khaeru et al. (2023) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan pelaku UMKM belum mampu mengelola keuangan secara tepat, sedangkan penelitian Harefa et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan inklusi keuangan menghambat akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan. Pengembangan UMKM tidak hanya bergantung

pada potensi pasar, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan formal.

Literasi keuangan merupakan kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola keuangan secara efektif, yang mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan keuangan. Bagi UMKM, literasi keuangan berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha melalui pengendalian biaya, peningkatan keuntungan, dan pengelolaan risiko keuangan. Maka literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan kinerja UMKM.

Secara empiris penelitian Trisnawati & Dewi (2024) menemukan bahwa semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangannya. Temuan tersebut didukung Muhammad & Wicaksari (2025) yang menyatakan bahwa literasi keuangan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga berdampak pada kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian Anggriani et al. (2023) serta Fitria (2024) menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan belum tentu diimplementasikan secara optimal dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menguji kembali pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM, khususnya pada UMKM kuliner di Kecamatan Trawas.

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika individu atau pelaku usaha memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sesuai kebutuhan, seperti

perbankan, kredit, tabungan, asuransi, dan layanan keuangan digital. Bagi UMKM, inklusi keuangan berperan dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendukung pengembangan usaha. Namun keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, khususnya di daerah, masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM dalam memperoleh modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. Efektivitas pemanfaatan layanan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan agar dapat memberikan manfaat secara optimal.

Penelitian Prathama et al. (2026) menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko usaha. Temuan tersebut didukung Hutaauruk et al. (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, semakin baik perilaku pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Namun Penelitian Hilmawati & Kusumaningtias (2021) serta Amin & Pamungkas (2022) menemukan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM masih belum konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendukung kinerja keuangan UMKM. Literasi keuangan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan keuangan, sedangkan inklusi keuangan menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang mendukung pengembangan usaha. Hubungan tersebut sejalan dengan *resource-based view theory* yang dikemukakan Barney (1991), yang menjelaskan bahwa

kemampuan memanfaatkan sumber daya internal, termasuk pengetahuan dan akses keuangan, dapat menjadi keunggulan strategis dalam meningkatkan kinerja usaha.

Penelitian ini penting dilakukan karena UMKM kuliner di Kecamatan Trawas masih menghadapi kendala berupa pencatatan keuangan yang belum terstruktur, pengendalian biaya yang kurang optimal, serta belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada UMKM di wilayah perkotaan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan karakteristik UMKM di kawasan wisata dengan pola pendapatan yang berbeda. Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu juga banyak menggunakan SmartPLS, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis IBM SPSS. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berjudul **Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan kinerja keuangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan tambahan kajian bagi mahasiswa maupun kalangan akademisi dalam mengembangkan penelitian di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi keuangan serta pemanfaatan layanan keuangan sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan kinerja usaha secara lebih optimal.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait dalam menyusun program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memperluas akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal melalui kemudahan prosedur pembiayaan, pendampingan pemanfaatan produk dan layanan keuangan, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga kinerja keuangan dapat meningkat secara optimal.